

ASIPPINDO

MAGAZINE | Edisi Agustus 2020



HUT Ke-75 RI
Sederhana dan Virtual

Tingkatkan Ekonomi
Pelaku UMKM



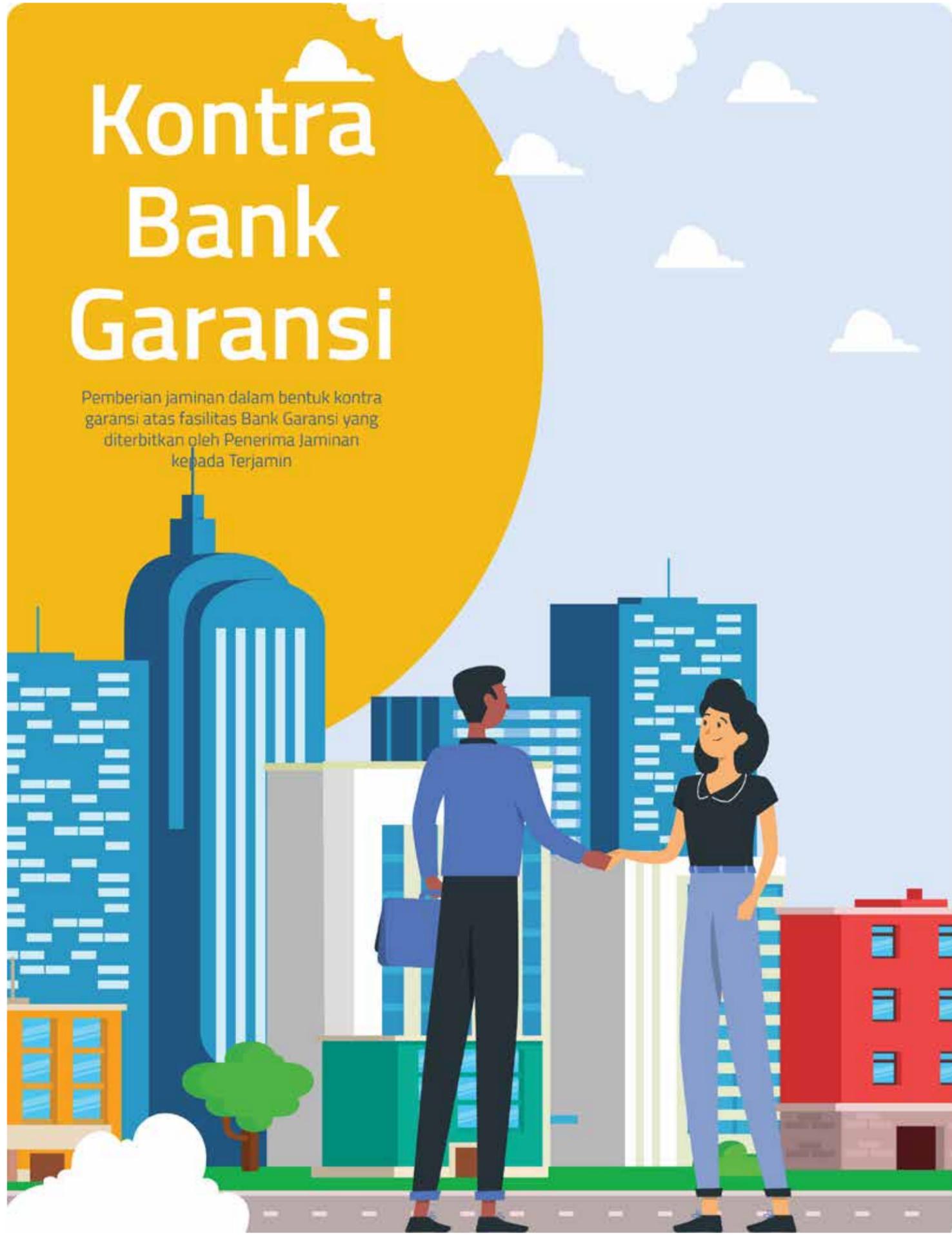
INDONESIA
MAJU





Surety Bond

Surety Bond adalah suatu perjanjian 3 pihak antara Surety (pihak pertama) atas dasar keyakinan kepada Principal (pihak kedua) secara bersama-sama berjanji kepada Obligee (pihak ketiga) bahwa apabila principal oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan obligee untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban principal tersebut



Kontra Bank Garansi

Pemberian jaminan dalam bentuk kontra garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin

SUSUNAN REDAKSI

- **Pelindung** : Ketua Asippindo
- **Penasihat** : Direktur Utama Perusahaan Penjaminan Anggota Asippindo

Tim Pelaksana :

- **Pimpinan Redaksi** :
 1. Chusnul Ma'arif
 2. Amin Mas'udi
- **Redaksi** : Hendriyanto
- **Editor** :
 1. Anzil Firdausi Nuzula
 2. Rully Ariefandi
- **Bendahara** : Lulu
- **Desain Grafis** : Dudi Rahmadi
- **Sirkulasi** : Rudiman

- **Penerbit** : Asippindo

- **Alamat Redaksi** :

Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa B-9 Kavling 6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 Indonesia.
 Telp. (62-21) 6540335.
 Fax. (62-21) 6540344.6540348
 Website : www.asippindo.or.id,
 E-Mail : sekretariat@asippindo.or.id



LIPUTAN KHUSUS

06 HUT Ke-75 RI Sederhana dan Virtual

10 Jamkrindo Hadirkan Semangat Kebangsaan di Geopark Ciletuh

12 Peran Askrindo Syariah Mendukung Indonesia Maju



SEPUTAR PENJAMINAN

17 Tingkatkan Ekonomi Pelaku UMKM

19 Jamkrida Kalsel Rangkul Pemkab dan Pemkot

21 Jamkrida NTT Menjamin Kredit Tetap Aman

24 Jamkrida Sulsel Mudahkkan UMKM Dapatkan Kredit

25 Jamkrida Banten Dapat Dua Penghargaan

26 Jamkrida Sumsel Meraih 3 Kategori Penghargaan



28 Bahas Penyertaan Modal untuk Jamkrida Babel

30 Pemprov NTB Targetkan Dividen BUMD Rp60 Miliar

RUBRIK KESEHATAN

32 Virus Bermutasi, Riset Vaksin Tetap Berlanjut

34 Ruang Perawatan Hampir Penuh

36 Menyiapkan Kota Tahan Krisis Pascapandemi

SITUASI DARURAT

PERINGATAN Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 digelar secara sederhana di tengah pandemi Covid-19. Sejarah mencatat, upacara

lahirnya kemerdekaan negeri ini juga digelar secara sederhana.

Dikutip dari kompas.id, upacara pengibaran Bendera Merah-Putih di masa darurat pada 17 Agustus 1945 dilaksanakan apa adanya. Saat itu Bendera Pusaka yang dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno, Sang Proklamator, dikibarkan oleh tiga orang saja. Mereka adalah Latief Hendraningrat, Suhud, dan SK Trimurti.

Tanpa berlatih tetapi dilandasi semangat merdeka

dan bebas dari penjajahan bangsa-bangsa kolonial, ketiganya berhasil menaikkan dan mengibarkan Sang Saka Merah Putih di halaman rumah Soekarno, yang kini berdiri Tugu Proklamasi.

Situasi darurat juga masih dirasakan saat upacara peringatan satu tahun kemerdekaan Indonesia yang digelar di Istana Kepresidenan Yogyakarta tahun 1946. Waktu itu, Presiden Soekarno memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Yogyakarta karena alasan keamanan dan ancaman pembunuhan terhadap para pemimpin negeri termasuk Soekarno-Hatta.

Kini, setelah 75 tahun Indonesia merdeka, kita memang mengalami kondisi darurat di tengah pandemi Covid-19. Tetapi kondisi kita saat ini jauh lebih baik dibanding masa awal kemerdekaan. Tugas kita sekarang bukan mengusir penjajah, tapi menggerakkan kembali ekonomi yang lesu dihantam pandemi. (*)

// Tim Redaksi

HUT KE-75 RI SEDERHANA DAN VIRTUAL



Di tengah pandemi Covid-19, bangsa Indonesia memperingati Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus. Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI pun digelar meski terbatas, sederhana dan virtual.

Waktu menunjukkan pukul 09.40 di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (17/8/2020) lalu. Delapan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka berbaris menuju halaman depan Istana Merdeka. Mereka bersiap untuk bertugas dalam upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan RI.

Tak hanya mengenakan setelan berwarna serba-putih dan peci hitam, para anggota Paskibraka itu pun mengenakan masker yang juga berwarna putih. Sepanjang

upacara, masker putih itu tak pernah lepas menutupi mulut serta hidung para anggota Paskibraka.

Upacara peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini memang tak biasa, karena digelar saat pandemi Covid-19 masih belum terkendali. Hanya delapan anggota Paskibraka saja yang bertugas mengibarkan serta menurunkan Sang Saka Merah Putih. Padahal biasanya, prosesi pengibaran dan penurunan bendera melibatkan 68 orang anggota Paskibraka.

Tak ada lagi pasukan 17, tak ada pula pasukan 45 yang

bertugas mengiring serta mengawal delapan pembawa Bendera Pusaka Merah Putih mengibarkan dan menurunkan bendera. Padahal, sejak tahun 1967 tiga pasukan Paskibraka itu selalu ada dalam setiap upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI di halaman Istana Merdeka, yang pernah menjadi rumah dinas Presiden pertama RI, Soekarno beserta keluarganya.

Pandemi Covid-19 memang memaksa semua instansi beradaptasi dengan kebiasaan baru, tak terkecuali Istana. Demi menghindari potensi penularan Covid-19, hanya delapan anggota Paskibraka saja yang dilibatkan. Hal itu berarti hanya pasukan delapan yang merupakan kelompok inti saja yang bertugas, tanpa pengiring dan pengawal.

Delapan anggota Paskibraka, yang bertugas itu, diambil dari cadangan Paskibraka pada 2019. Bagi mereka tentu sebuah kehormatan jika pada 2020 ini akhirnya ditunjuk untuk bertugas kembali. Dari delapan anggota Paskibraka 2020 ini, menurut Kepala Sekretaris Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, Heru Budi Hartono kepada Kompas, empat orang akan bertugas pada pengibaran Bendera Pusaka pagi hari. Sementara, empat orang lainnya akan bertugas pada penurunan Bendera Pusaka sore harinya.

"Dari empat orang Paskibraka yang tugas pagi dan sore, salah seorangnya akan menjadi cadangan. Jadi, hanya tiga orang saja yang bertugas menaiki dan menurunkan

“

Pandemi Covid-19 memang memaksa semua instansi beradaptasi dengan kebiasaan baru, tak terkecuali Istana. Demi menghindari potensi penularan Covid-19, hanya delapan anggota Paskibraka saja yang dilibatkan. Hal itu berarti hanya pasukan delapan yang merupakan kelompok inti saja yang bertugas, tanpa pengiring dan pengawal.



Bendera Pusaka,” ujar Heru.

Upacara juga hanya diikuti 14 orang, termasuk Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Nyonya Iriana Joko Widodo serta Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wury Estu Handayani. Peserta lainnya adalah sejumlah pimpinan lembaga negara seperti Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua DPR dan Ketua Komisi Yudisial. Ketua MPR Bambang Soesatyo hadir dan bertugas sebagai pembaca naskah Pembukaan UUD 1945. Presiden dan Wapres juga hanya didampingi seorang menteri yaitu Menteri Agama, yang kebetulan bertugas sebagai pembaca doa.

Bahkan, Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Sekretaris

“

Upacara kemerdekaan dengan sejumlah keterbatasan itu tentu akan selalu diingat oleh segenap bangsa Indonesia, tak terkecuali delapan anggota Paskibraka. Sebab tak hanya mewakili para remaja sekolah di Tanah Air, mereka juga harus berlatih dan bertugas di tengah kecemasan akan pandemi Covid-19 yang merupakan ancaman bagi negara-negara di seluruh dunia.

is Kabinet Pramono Anung serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang hampir setiap hari selalu bersama Presiden Jokowi, pada peringatan 17 Agustus kali ini, justru menghadiri Upacara Detik-detik proklamasi Kemerdekaan RI secara daring dari kantornya yang tak jauh dari halaman Istana Merdeka.

Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey T Machmudin, berkali-kali menjelaskan, pembatasan peserta dan petugas upacara diputuskan untuk menunjukkan kepada masyarakat mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan yang ketat meskipun merayakan Kemerdekaan RI.

Upacara kemerdekaan dengan sejumlah keterbatasan itu tentu akan selalu diingat oleh segenap bangsa Indonesia, tak terkecuali delapan anggota Paskibraka. Sebab tak hanya mewakili para remaja sekolah di Tanah Air, mereka juga harus berlatih dan bertugas di tengah kecemasan akan pandemi Covid-19 yang merupakan ancaman bagi negara-negara di seluruh dunia.

“Kesannya pasti cemas, tapi bangga,” kata Muhammad Adzan, siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Bima, Nusa Tenggara Barat yang bertugas sebagai pembentang Bendera Pusaka pada upacara peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI.

Cemas, karena ia harus menjalankan tugas di tengah ancaman pandemi Covid-19. Bangga, karena ia bisa kembali mengharumkan nama daerah, sekolah serta orang tua.

Namun, kecemasan yang dirasakan Adzan sirna karena merasa telah mendapatkan tanggung jawab yang besar, mengibarkan Sang Saka Merah Putih hanya dengan tujuh anggota Paskibraka lainnya. Rasa tanggung jawab itu pula yang memacu semangat untuk terus berlatih keras agar mereka dapat mempersembahkan yang terbaik pada upacara peringatan kemerdekaan.

Perasaan was-was juga dirasakan Muhammad Asri Maulana, anggota Paskibraka dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Bahkan awalnya, orang tua Asri pun sempat cemas karena harus melepas putranya berlatih dan bertugas di Jakarta saat masa darurat kesehatan.

“Ini, kan masa pandemi, ada rasa takut. Orang tua juga sedikit takut,” tuturnya. Tetapi rasa takut itu pun berangsur hilang saat melihat ketatnya protokol kesehatan yang harus dijalankan selama karantina.

Indrian Puspita Ramadhani, pembawa Sang Saka Merah-Putih pada upacara pengibaran bendera kali ini, juga

tak lepas dari rasa takut seperti teman-temannya. Namun, rasa takut yang dirasakan siswi SMA Negeri 1 Bireuen, Aceh, itu pun lenyap berganti dengan rasa bangga karena sadar akan tanggung jawab besar yang diembannya.

Keterbatasan dalam peringatan kemerdekaan pada tahun ini memang mengingatkan segenap bangsa Indonesia pada upacara pengibaran Bendera Merah-Putih di masa darurat, 75 tahun lalu. Saat itu Bendera Pusaka yang dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno, Sang Proklamator, juga dikibarkan oleh tiga orang saja. Mereka adalah Latief Hendraningrat, Suhud, dan SK Trimurti. Tanpa berlatih tetapi dilandasi semangat merdeka dan bebas dari penjajahan bangsa-bangsa kolonial, ketiganya berhasil menaikkan dan mengibarkan Sang Saka Merah Putih di halaman rumah Soekarno, yang kini berdiri Tugu Proklamasi.

Berkat kesigapan mereka, Bendera Merah-Putih berkibar sempurna di di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta. Pengibaran bendera yang akhirnya disambut gegap gempita oleh seluruh rakyat, karena saat itulah Indonesia merdeka.

Situasi darurat juga masih dirasakan saat upacara peringatan satu tahun kemerdekaan Indonesia yang digelar di Istana Kepresidenan Yogyakarta tahun 1946. Waktu itu, Presiden Soekarno memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke ke Yogyakarta karena alasan keamanan dan ancaman pembunuhan terhadap para pemimpin negeri termasuk Soekarno-Hatta.

Saat itu, sebenarnya, Mayor H Mutahar, yang diberi tugas menyiapkan pengibaran Bendera Pusaka oleh Presiden Soekarno, menginginkan pengibaran bendera dilakukan oleh para pemuda-pemudi dari seluruh penjuru Tanah Air. Tetapi situasi darurat membuat keinginan mengumpulkan pemuda-pemudi dari seluruh daerah sulit dilaksanakan.

Ajudan Soekarno itu pun kemudian memilih lima orang pemuda-pemudi dari beberapa daerah yang kebetulan tengah berada di Yogyakarta, Ibu Kota Negara RI kala itu. Mutahar yang kemudian menurut Cindy Adams dalam buku “Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat,” diberi tugas untuk menyelamatkan Bendera Pusaka pada saat Agresi Militer Belanda II tahun 1948, memilih lima pengibar bendera sebagai

simbol Pancasila.

Kini, upacara peringatan 75 tahun kemerdekaan Indonesia memang dilakukan dalam situasi darurat, sama seperti upacara peringatan bendera di awal kemerdekaan itu. Bedanya, dahulu situasi darurat karena penjajah Belanda kembali mengincar Indonesia, sedangkan saat ini karena pandemi Covid-19. Karena itu, sudah sepantasnya semua elemen bangsa bersatu-padu melawan musuh bersama, yaitu Covid-19, agar generasi penerus tak kehilangan harapan Indonesia maju pada tahun 2045.

Jika delapan anggota Paskibraka di tengah kondisi darurat Covid-19 mampu menjalankan tugasnya dengan baik menaikkan dan mengibarkan Sang Saka, juga kelima pemuda yang terpilih saat menaikkan dan mengibarkan Bendera Pusaka di halaman Gedung Agung atau Istana Yogyakarta saat ancaman tentara Belanda yang mau bercokol kembali, tentu kita pun harus ikut membantu bersama-sama mendisiplinkan diri menggunakan masker dan menjaga jarak serta kebersihan tubuh dan tangan kita dari pandemi Covid-19. (Sumber: kompas.id)



JAMKRINDO HADIRKAN SEMANGAT KEBANGSAAN DI GEOPARK CILETUH

PT Jamkrindo menyelenggarakan sejumlah kegiatan di Ciletuh Palabuhanratu Unesco Global Geopark (CPUGGp) atau yang sering dikenal dengan Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjelang perayaan hari ulang tahun ke-75 Kemerdekaan Indonesia. Melalui berbagai kegiatan ini, perusahaan penjaminan kredit tersebut ingin menghadirkan semangat kebangsaan bagi semua kalangan.

Kegiatan-kegiatan di Geopark Ciletuh tersebut juga dilaksanakan dalam rangka membangkitkan optimisme masyarakat di tengah dampak pandemi Covid-19. Sepanjang Jumat hingga Minggu (14-16 Agustus 2020), PT Jamkrindo melaksanakan kegiatan penyerahan dua taman bacaan, pelestarian alam lanjutan melalui penanaman pohon, pemasangan spanduk kampanye 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan), pembagian masker, dan pelatihan pengolahan mangga.

Direktur Utama PT Jamkrindo Randi Anto menjelaskan, Jamkrindo terus mengambil bagian secara aktif dalam berbagai inisiatif untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. "Secara khusus, di Kawasan Geopark Ciletuh kami terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat dan telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk masa pendampingan selama tiga tahun, dimulai dari tahun 2019," ujar Randi dalam siaran pers, Sabtu 15 Agustus 2020.

Taman bacaan masyarakat diserahkan oleh PT Jamkrindo untuk masyarakat di Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok dan masyarakat Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas. Adapun masker dibagikan untuk masyarakat dan pengunjung di Pantai Palangpang, Kecamatan Ciemas serta 400

masker untuk guru dan siswa SDN Cipaku, Kecamatan Ciracap.

Sementara itu, belasan spanduk himbuan dan kampanye 3M dipasang di beberapa destinasi wisata serta tempat-tempat strategis di Kecamatan Ciemas. Kegiatan pelestarian alam di Pantai Palangpang, Kecamatan Ciemas dilaksanakan sebagai lanjutan kegiatan yang sama yang telah dilaksanakan pada Desember 2019 dan Juli 2020.

Melalui kegiatan ini, Jamkrindo yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Ciwaru dan Ikatan Homestay Ciletuh menambah kawasan hijau di sepanjang Pantai Palangpang.

Adapun kegiatan pelatihan pengolahan mangga, diberikan untuk



Penanaman pohon di area Geopark Ciletuh.

“

Sebelumnya, Jamkrindo juga telah memberi pelatihan budidaya hidroponik untuk para anggota Asosiasi Homestay Ciletuh untuk memberi nilai tambah dan sarana edukasi di kawasan homestay Ciletuh.



Simbolis penyerahan bibit pohon dan bantuan lainnya.

para anggota UKM Saluyu, yakni kelompok pelaku usaha rumahan di Kecamatan Ciemas untuk memberi nilai tambah komoditas mangga yang menjadi salah satu komoditas andalan Ciemas. Di Kecamatan Ciemas, terdapat sekitar 200 hektar kebun mangga milik masyarakat dengan produksi ratusan ton.

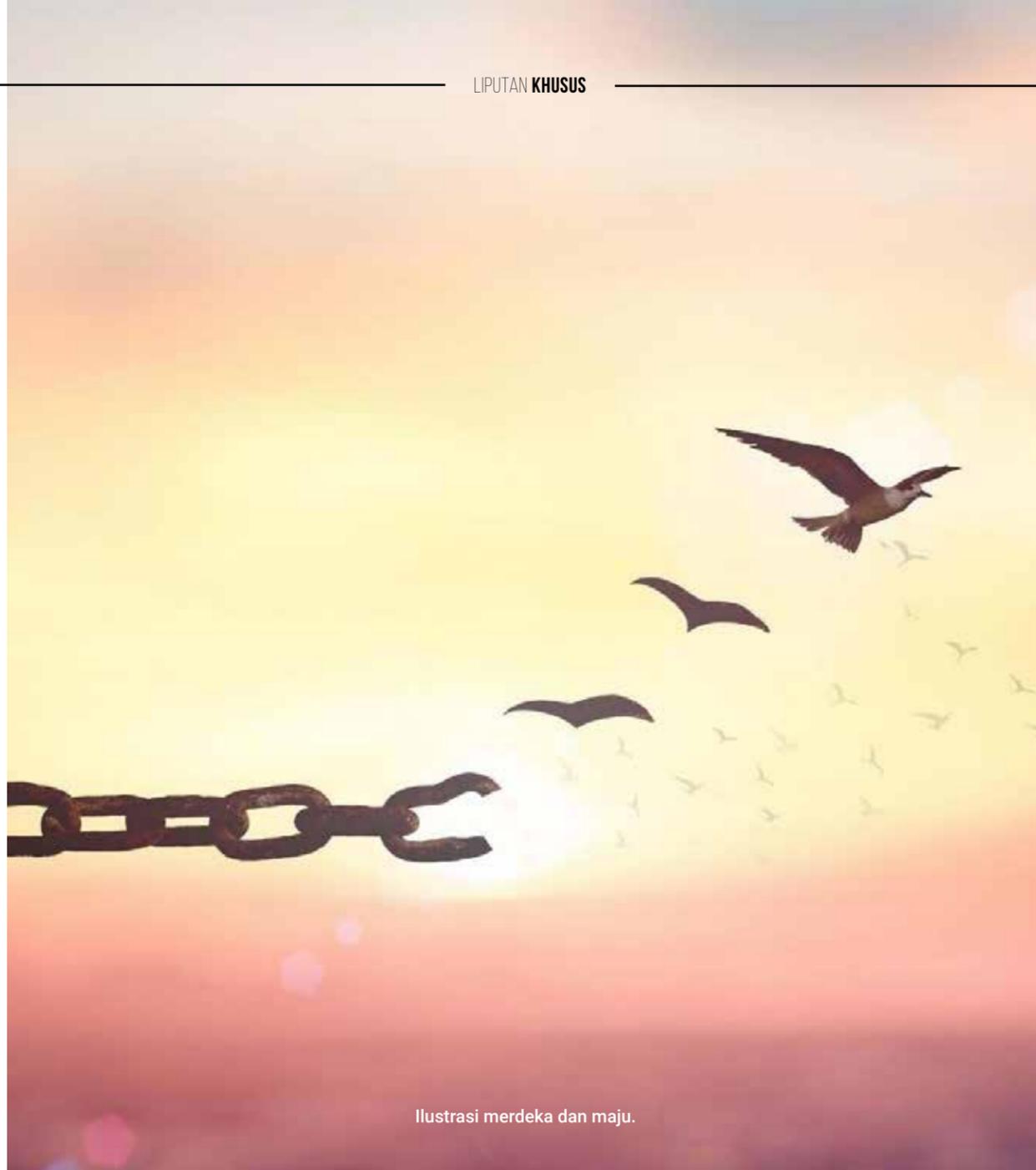
Pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya lokal itu bukan yang pertama dilakukan oleh perusahaan penjaminan kredit tersebut. Randi Anto menambahkan, sebelumnya Jamkrindo juga telah memberi pelatihan budidaya hidroponik untuk para anggota Asosiasi Homestay Ciletuh untuk memberi nilai tambah dan sarana edukasi di kawasan homestay Ciletuh. Terdapat sedikitnya 100 homestay di Geopark Ciletuh yang setiap pekan menerima kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Ciletuh.

Ketua Asosiasi Homestay Ciletuh Yudi Mulyadi mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian masyarakat bertumpu pada kegiatan wisata dan kegiatan ikutannya di Geopark Ciletuh. Kegiatan ekonomi ini berhasil menarik pulang masyarakat yang sebelumnya merantau.

“Dulu banyak masyarakat Ciletuh merantau karena merasa tidak terlalu banyak peluang di sini. Sekarang, sebagian perantau, bahkan para tenaga kerja Indonesia di luar negeri pulang dan mengembangkan ekonomi di sini,” ujar Yudi.

Bantuan yang diserahkan oleh Jamkrindo juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Guru SDN Cipaku, Saleh M, mengucapkan terima kasih atas bantuan masker kain untuk guru dan siswa. Masker itu sangat diperlukan karena guru dan siswa harus melaksanakan tatap muka selama masa pandemi covid-19.

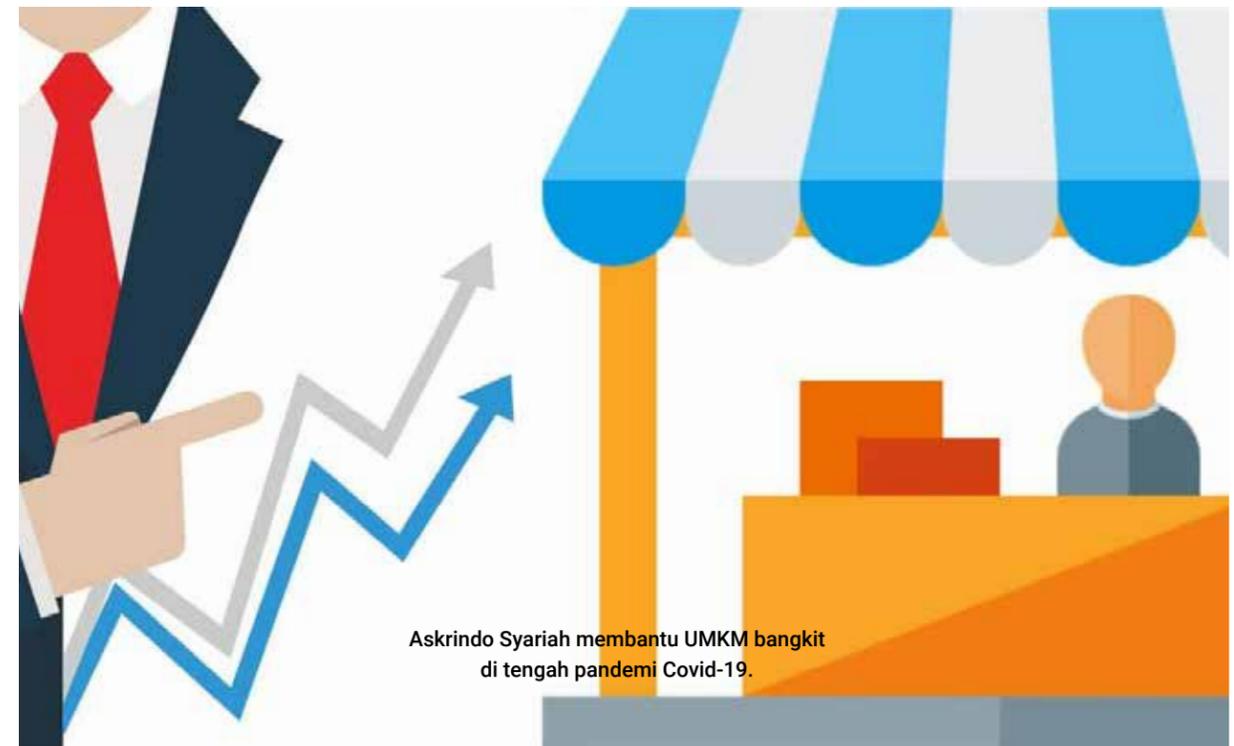
“Di wilayah kami, jaringan internet tidak terlalu bagus dan biaya untuk menyediakan kuota internet bagi orang tua murid sangat berat. Untuk itu kami membentuk 5 kelompok di setiap kelas dan guru setiap hari mendatangi dua atau tiga kelompok untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi, masker sangat penting bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Jamkrindo atas bantuan ini,” ujar Saleh. (*)



Ilustrasi merdeka dan maju.

PERAN ASKRINDO SYARIAH MENDUKUNG INDONESIA MAJU

“MERDEKA atau mati”. Itulah teriakan yang selalu dikumandangkan para pahlawan bangsa saat berjuang mengusir penjajah dari negeri ini. Pekikan tersebut membangunkan semangat para pejuang kemerdekaan, terlebih menyadarkan mereka untuk tetap memperjuangkan cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka.



Askrindo Syariah membantu UMKM bangkit di tengah pandemi Covid-19.

Kata-kata itulah akhirnya menjadikan bangsa Indonesia mengumumkan merdeka pada 17 Agustus 1945. Tanpa terasa 75 tahun berlalu sejak pengumuman kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Banyak pembangunan di semua sektor yang telah dicapai.

Saat ini, hampir seluruh bangsa, tidak terkecuali Indonesia mendapatkan cobaan wabah korona baru atau covid-19. Pandemi covid-19 telah berdampak pada beberapa sektor yang mengalami penurunan produksi, tidak terkecuali industri jasa keuangan.

Tidak terkecuali PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah), yang merupakan salah satu perusahaan jasa keuangan yang bergerak dalam bidang penjaminan pembiayaan berbasis syariah. Walau terdampak, Askrindo Syariah berkeyakinan mampu tumbuh bersama para mitra dengan tetap berjuang dalam keadaan apapun.

“Askrindo Syariah selalu berpartisipasi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya dibidang penjaminan pembiayaan syariah. Kami sadari usia 75 tahun kemerdekaan, negara ini mengalami cobaan pandemi yang mengakibatkan beberapa sendi perekonomian mengalami penurunan. Tapi, justru hal tersebut yang menjadikan kita semakin kuat dan yakin bahwa pandemi ini tidak akan menghalangi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia untuk dapat menjadi lebih baik,” kata Kepala Sekretaris

Perusahaan & Legal Askrindo Syariah, Wisnoe Marety.

Ia mengutarakan, selama ini Askrindo Syariah telah mendukung program pemerintah, antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada program itu, Askrindo Syariah berperan menjamin pembiayaan KUR berbasis Syariah. Selain itu, baru-baru ini Askrindo Syariah melakukan kerja sama penjaminan pembiayaan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Walaupun di tengah pandemi covid-19, Askrindo Syariah terus berusaha untuk dapat ikut berperan dalam membangun perekonomian.

“Diharapkan dengan adanya kerjasama PEN tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” tambah dia.

Dengan 32 jaringan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Askrindo Syariah yakin dapat lebih memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh mitra. “Askrindo Syariah mendukung penuh setiap program yang dijalankan oleh pemerintah demi membangun perekonomian dalam rangka menuju Indonesia Maju,” ungkap Marety.

Karena kerja keras dan komitmen turut serta dalam pembangunan ekonomi, belum lama ini Askrindo Syariah berhasil dinobatkan sebagai penjamin KUR 2019 Terbaik II dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (Sumber: <https://mediaindonesia.com>)

JAMKRINDO GENCAR SOSIALISASI PENJAMINAN KREDIT MODAL KERJA

Sebagai perusahaan terbesar di bidang penjaminan kredit, PT Jamkrindo gencar melakukan sosialisasi penjaminan kredit modal kerja (KMK) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program tersebut dibangun dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Perekonomian Nasional atau PEN.

“

Sosialisasi ini merupakan sebuah hal yang penting dalam mendukung pencapaian target penyaluran KMK PEN itu sendiri. Sebagai penjamin kredit, Jamkrindo tentunya tidak ingin hanya pasif saja menunggu. Kami aktif melakukan jemput bola dan juga melakukan sosialisasi bersama stakeholder lainnya baik dari pemerintahan maupun kalangan perbankan.



Sebagai bentuk salah satu sosialisasi, pada hari Senin 24 Agustus 2020, PT Jamkrindo pun menggelar acara webinar Jamkrindo Talk dengan tema “Penjaminan Kredit Modal Kerja untuk Menyelamatkan UMKM.”

Webinar tersebut dihadiri oleh pembicara di bidangnya masing-masing antara lain, Direktur Bisnis Penjaminan PT Jamkrindo Amin Mas’udi, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kementerian Keuangan, Heri Setiawan dan Founder Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi.

Sementara itu Direktur Utama PT Jamkrindo Randi Anto mengatakan acara webinar tersebut diharapkan dapat membantu para UMKM untuk mengenal lebih dalam mengenai Program Kredit Modal Kerja (KMK) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan begitu, ia berharap kegiatan webinar tersebut dapat membantu meningkatkan *awareness* program KMK di pelaku UMKM Indonesia.

“Sosialisasi ini merupakan sebuah hal yang penting dalam mendukung pencapaian target penyaluran KMK PEN itu sendiri. Sebagai penjamin kredit, Jamkrindo tentunya tidak ingin hanya pasif saja menunggu. Kami aktif melakukan jemput bola dan juga melakukan sosialisasi bersama *stakeholder*

lainnya baik dari pemerintahan maupun kalangan perbankan,” ujar Randi.

Sementara itu pelaku usaha yang dapat dipenuhi oleh program dari KMK sendiri diantaranya: Nasabah harus mempunyai usaha yang terdampak Covid-19, pinjaman modal kerja baru atau tambahan (restrukturisasi), plafond samapai dengan Rp 10 miliar, jangka waktu pinjaman maksimal 3 tahun, subsidi IJP, pinjaman yg dijamin maksimal SP terbit pada 30 November 2021, syarat terjamin kol 1 atau 2 pada 29 Februari 2020 dan pengajuan pinjaman PEN serta memiliki syarat bank penyalur bank umum, reputasi baik komposit 1 atau 2.

Terkait progress dari program KMK itu sendiri, Direktur Bisnis Penjaminan Jamkrindo Amin Mas’udi mengatakan hingga saat ini Jamkrindo telah bekerjasama dengan 20 bank penyalur KMK PEN. Adapun realiasi penjaminan KMK PEN Jamkrindo sampai dengan 24 Agustus 2020 tercatat sebesar Rp 849,79 miliar dengan jumlah UMKM terjamin sebanyak 1.473 UMKM.

“Dengan jaringan pelayanan kami yang tersebar di 9 kantor wilayah, 56 kantor cabang, 19 kantor unit pelayanan, kami

“

Dengan jaringan pelayanan kami yang tersebar di 9 kantor wilayah, 56 kantor cabang, 19 kantor unit pelayanan, kami siap untuk mendukung program KMK PEN ini

siap untuk mendukung program KMK PEN ini,” ujar Amin.

Amin mengharapkan jumlah penerbitan sertifikasi itu dapat terus bertambah sesuai yang ditargetkan yakni sebesar Rp 18,4 triliun. “Harapan kami UMKM bisa cepat akses kredit dan memanfaatkan sehingga ekonomi cepat pulih,” ucapnya.

Amin melanjutkan, di tengah pandemi Covid-19 ini, UMKM merupakan salah satu lokomotif pendorong ekonomi nasional. Maka itu, pemerintah memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan modal kerjanya, sehingga bisnis pun bisa terus berjalan meski di tengah tantangan pandemi.

“Yakinlah UMKM tidak akan jalan sendiri, pemerintah terus support dan berikan solusi. Berbagai kebutuhan permodalan sudah tidak lagi menjadi isu bagi UMKM saat ini,” katanya.

Pada kesempatan itu juga Amin mengemukakan untuk nilai kredit hingga Rp 1 miliar, otomatis akan langsung dijamin oleh Jamkrindo setelah dianalisa oleh pihak bank. Sedangkan, nilai kredit Rp 1 miliar hingga Rp 10 miliar

dikenakan agunan sesuai ketentuan perbankan dan akan dianalisa oleh Jamkrindo dan perbankan.

“Di bawah Rp 1 miliar tidak ada agunan, dapat diganti penjaminan dari Jamkrindo,” ucap Amin.

Sementara itu Founder Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi dalam pemaparannya membagikan tips dan trik agar UMKM bisa bertahan dan bangkit di era pandemi, seperti misalnya memanfaatkan teknologi dalam pemasarannya.

Ia juga menyarankan UMKM untuk terus memantau perkembangan atau perubahan perilaku konsumen di era pandemi. “UMKM harus adaptif terhadap perkembangan dan tren perubahan perilaku konsumen ini,” ujar dia.

Program KMK ini sendiri mengacu pada UUD nomor 2 dimana tersebut yakni dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020. Program ini sendiri bertujuan agar UMKM dapat bangkit kembali serta bisa mempercepat memulihkan perekonomian nasional karena serangan pandemi Covid-19. Adapun lembaga penjaminan modal kerja yang ditunjuk pemerintah adalah PT Jamkrindo dan PT Askrindo. (*)



Tas produk UMKM.

TINGKATKAN EKONOMI PELAKU UMKM

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kementerian Keuangan Heri Setiawan menjelaskan, skema penjaminan kredit modal kerja UMKM telah diatur melalui PMK No 71/2020.

Di dalam pelaksanaannya sendiri, pemerintah menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melaksanakan penjaminan program PEN, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, serta kesinambungan fiskal. Tujuan dari program ini untuk membantu meningkatkan ekonomi para pelaku usaha.

“Tujuan dari pemberian kredit modal kerja ini ialah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya,” ujar Heri Setiawan ketika menjadi pembicara dalam webinar Jamkrindo Talk bertajuk “Penjaminan Kredit Modal Kerja untuk Menyelamatkan UMKM” pada Senin, 24 Agustus 2020.

Adapun kriteria penerima jaminan, dalam hal ini perbankan, adalah merupakan bank umum, memiliki reputasi yang baik, dan merupakan bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK serta sanggup menyediakan sistem informasi yang memadai untuk melaksanakan program penjaminan Pemerintah.

Sementara itu, kriteria untuk terjamin atau pelaku usaha UMKM adalah, merupakan pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan plafon pinjaman maksimal Rp 10 miliar per debitur termasuk tambahan fasilitas yang telah diterima.

Kemudian, pinjaman yang dijamin adalah pinjaman yang sertifikat penjaminannya diterbitkan paling lambat tanggal 30 November 2021 sampai dengan selesainya tenor pinjaman tersebut. Tenor pinjaman yang diberikan bagi UMKM maksimal 3 tahun, UMKM tidak termasuk ke dalam daftar hitam nasional, serta memiliki performing loan lancar atau kolek-



“

Tujuan dari pemberian kredit modal kerja ini ialah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

tibilitas 1 maupun kolektibilitas 2 dihitung per tanggal 29 Februari 2020. "UMKM terjamin ini dapat Berbentuk usaha perseorangan, koperasi, ataupun badan usaha," ujar Heri.

Sedangkan untuk mekanisme penjaminannya sendiri Heri memaparkannya sebagai berikut:



Pihak pemerintah menargetkan penyaluran KMK dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Dimana tahap satu semester dua tahun 2020 dengan target Rp 60 triliun hingga Rp 65 triliun, dengan keterangan akan dievaluasi efektivitasnya pada bulan Desember 2020.

Sementara itu untuk tahap dua semester 1 tahun 2021 target sisa pagu tahap 1 yang tidak digunakan

ditambah menjadi sebesar Rp 25 triliun. Dengan keterangan akan dievaluasi efektivitasnya pada bulan Juni 2021. Sedangkan untuk tahap tiga sisa pagu tahap dua yang tidak digunakan ditambah menjadi Rp 10 triliun.

Hingga saat ini pemerintah mencatat perkembangan penjaminan UMKM diantaranya:



JAMKRIDA KALSEL RANGKUL PEMKAB DAN PEMKOT



UMKM pengrajin kain Sasirangan di Kalimantan Selatan.

Difasilitasi Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, M Yani Helmi, Direktur PT Jamkrida Kalsel, Suyanto sudah berkomunikasi langsung dengan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, H Sudian Noor di Batulicin, Tanah Bumbu, Jumat (7/8/2020).

Pertemuan tersebut membahas rencana kerjasama berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada PT Jamkrida Kalsel. Dimana dalam pertemuan tersebut, H Sudian Noor menyatakan pihaknya masih menunggu surat resmi permohonan penyertaan modal dari PT Jamkrida Kalsel.

Selanjutnya, pihaknya akan menindaklanjutinya dengan melakukan kajian-kajian ekonomi lalu meneruskannya ke DPRD Kabupaten Tanah Bumbu untuk dibahas. "Tim ekonomi kami akan buat kajian untuk diserahkan ke DPRD dan ditindaklanjuti, karena ini bentuknya penyertaan modal," kata H Sudian Noor.

Namun secara garis besar Ia mengakui kerjasama tersebut bisa membawa dampak ekonomi positif bagi Kabupaten Tanah Bumbu. Pasalnya dengan makin kuatnya permodalan PT Jamkrida tentu makin besar dan luas pula cakupan fasilitasi penjaminan kredit yang bisa disalurkan PT Jamkrida termasuk untuk para UMKM di Kabupaten berujung Bumi Bersujud ini.

"Otomatis terhadap PAD juga akan positif. Tapi perlu kami kaji dulu. Arahnya bukan UMKM saja tapi usaha mikro juga untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya," kata H Sudian Noor.

Sebelumnya, Direktur PT Jamkrida Kalsel, Suyanto menyatakan dengan tambahan penyertaan modal tersebut bisa memperkuat rasio ketersediaan modal dibanding jumlah penjaminan yang dikeluarkan PT Jamkrida Kalsel.

Dimana hingga penghujung Bulan Juli Tahun 2020, jumlah penjaminan oleh PT Jamkrida Kalsel sudah mencapai Rp 2,94 triliun untuk 24.500 pelaku UMKM dan diperkirakan

“

Hingga Juli 2020, volume penjaminan oleh Jamkrida Kalsel sudah mencapai Rp 2,94 triliun untuk 24.500 pelaku UMKM dan diperkirakan sudah ada 40 ribu tenaga kerja yang terserap dari usaha para pelaku UMKM tersebut di Kalsel.

sudah ada 40 ribu tenaga kerja yang terserap dari usaha para pelaku UMKM tersebut di Kalsel.

Sedangkan hingga akhir Tahun 2020 ini, Ia menargetkan penjaminan bisa meningkat hingga mencapai Rp 3,5 triliun untuk 30.000 UMKM dan menyerap total 50 ribu tenaga kerja.

Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yani Helmi mengapresiasi PT Jamkrida setempat yang mau merangkul pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) untuk penguatan permodalan dan pengembangan usaha.

"Saya kira kita perlu mengapresiasi PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Kalsel yang mau merangkul Pemkab/Pemkot buat penguatan permodalan dan pengembangan usaha," ujarnya.

Ajakan laki-laki yang akrab dengan sapaan Paman Yani mengapresiasi Jamkrida tersebut ketika diskusi kecil-kecilan bersama Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel Sudian Noor di Batulicin, ibu kabupaten tersebut.

Ia berharap, dengan adanya keinginan yang terus dari para perusahaan daerah untuk melebarkan sayap/mengemukakan usaha nantinya mampu memberikan kontribusi lebih bagi pendapatan/perekonomian masyarakat Kalsel yang tersebar pada 13 kabupaten/kota.

"Selain itu, yang kami apresiasi PT Bangun Banua, juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel yang terus berinovasi," ujarnya dalam diskusi tersebut yang turut serta pula Direktur Utama (Dirut) PT Jamkrida Suyanto.

Bahkan, Paman Yani berharap pula dari keinginan atau inovasi baru lagi yang ingin dicapai 2020 dengan pengembangan bidang usaha lain targetnya bisa terealisasi secara pasti.



Gedung DPRD Kalimantan Selatan.

"Kami akan terus dorong mereka (BUMD) agar dapat terus melebarkan sayap untuk inovasi sehingga bukan hanya target. Tetapi realisasi ekonomi untuk masyarakat bisa terwujud," ucapnya dengan semangat.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itupun optimistis apabila ada pergerakan secara pasti dari sejumlah BUMD Pemprov Kalsel pada 2020, dipastikan dapat berkembang sesuai perencanaan.

"Alhamdulillah, ada sejumlah BUMD kita yang berkembang dan terus berinovasi, seperti Bank Kalsel, PT Bangun Banua yang terus mengembangkan bisnis. Hal itu perlu terus mendapatkan dukungan agar stimulus perekonomian di Kalsel juga kembali berangsur baik," demikian Paman Yani. (Sumber: banjarmasinpost.co.id/ Antara)

“

Saya kira kita perlu mengapresiasi PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Kalsel yang mau merangkul Pemkab/Pemkot buat penguatan permodalan dan pengembangan usaha.

JAMKRIDA NTT MENJAMIN KREDIT TETAP AMAN

Kondisi dan perkembangan kredit dan jaminan kredit usaha di sektor usaha mikro kecil dan menengah di NTT hingga paruh pertama tahun ini berjalan baik dan sehat.

Salah satu faktornya oleh dukungan lembaga penjaminan kredit daerah Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Jamkrida berfungsi menjamin kredit tetap aman dan nyaman.

Pernyataan itu dikemukakan Direktur Utama Lembaga Penjamin Kredit atau dikenal PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTT, Drs. Ibrahim Imang, kepada VoxNtt.com di kantornya, belum lama ini.

Dalam percakapan perihal kondisi dan situasi kredit di NTT pada masa badai Covid-19 ini, mantan Direktur Bank NTT ini menyebutkan, salah satu program pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu untuk memajukan sektor ekonomi, khususnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Program pemerintah NTT ini perlu didukung luas, antara lain dibutuhkan lembaga yang dapat menjamin kelangsungan sektor usaha yang sanggup memberikan perlindungan serta bimbingan/pelatihan yang tepat guna memajukan usaha di



UMKM terus beruang di tengah pandemic Covid-19.



UMKM di Nusa Tenggara Timur (NTT)

sektor UMKMK.

“Tujuan akhirnya ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dalam wilayah Provinsi NTT,” kata Ibrahim Imang.

Berlatar belakang tujuan tersebut, tambah Ibrahim, maka dipandang perlu untuk membentuk Lembaga/Perusahaan Penjamin Kredit untuk memfasilitasi dan menjamin badan usaha maupun perorangan yang akan mengajukan kredit di sektor perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya serta koperasi.

Jika dicermati setting historis lahirnya lembaga penjamin kredit ini, maka ditemukan *reasoningnya* yang terkait langsung dengan misi mulia yaitu agar para kreditor tidak harus gelisah dengan kredit yang ditempuh untuk menjalankan bisnis mereka.

Maka sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2013 yang terbit 17 Oktober 2013 dan Akta Pendirian Nomor 52 tanggal 24 September 2014, dibentuklah Lembaga/Perusahaan Penjaminan yang diberi nama Perseroan Terbatas.

Dijelaskan, pembentukan PT. Jamkrinda NTT bermaksud untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi serta memberikan jaminan finansial terhadap badan usaha maupun perorangan yang akan mengajukan kredit/pinjaman pada sektor perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya serta koperasi.

Di samping itu diharapkan dengan pembentukan PT. Jamkrinda NTT dapat mendorong sektor usaha UMKMK agar dapat mengembangkan komoditas unggulan daerah demi

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTT pada umumnya.

Karena itu, tujuan pembentukan PT. Jamkrinda NTT antara lain adalah memberikan jasa penjaminan kredit kepada sektor Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Meningkatkan ekonomi daerah dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan ini sesungguhnya dibangun di atas fondasi filosofis yang kokoh dan kuat yaitu bahwa Jamkrinda hendak terlibat jauh dalam upaya membebaskan rakyat NTT dari aneka belenggu sosial yang memiskinkan dirinya.

Karena itu PT. Jamkrinda NTT lahir dari panggilan moral pembebasan rakyat dari belenggu rantai kemiskinan yang akut yang berlangsung amat sangat lama di daerah ini.

Kecuali itu, Bung Iba, begitu kerap ia disapa, menerangkan PT. Jamkrinda NTT dapat memberikan jaminan dan perlindungan kepada calon debitur khususnya usaha di sektor UMKMK untuk seluruh masyarakat di wilayah Provinsi NTT.

Untuk mengoperasikan mimpi besar ini, maka PT. Jamkrinda NTT menjadikan dirinya sebagai Perusahaan Penjaminan yang sehat, kompetitif, terpercaya dan terus berkembang dalam penguatan sektor usaha UMKMK demi menuju terciptanya peningkatan ekonomi yang tangguh dan merata.

Mantan Direktur Bank NTT ini merinci kultur atau budaya kerja yang harus dijiwai dan dihayati oleh seluruh jajaran Perusahaan, dalam setiap proses usaha perusahaan yaitu:

Tugas dan fungsi Jamkrinda NTT antara lain melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penjaminan untuk membantu

akses kredit khususnya kepada sektor usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang mempunyai kelayakan usaha (*feasible*) namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan/lembaga keuangan, khususnya dalam pemenuhan agunan (belum *bankable*).

Penjaminan kredit akan mengambil alih sementara risiko pelunasan debitur (Terjamin) kepada pihak perbankan/lembaga keuangan/kredit (Penerima Jaminan), apabila pada waktu yang telah diperjanjikan, terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Dengan penjaminan dari PT. Jamkrinda, diharapkan agar pihak perbankan/lembaga keuangan/kredit lebih aman dan lebih ekspansif dalam menyalurkan kredit khususnya kepada sektor usaha UMKMK.

Pertumbuhan kinerja keuangan PT. Jamkrinda NTT periode 2017 sampai dengan bulan Juni 2020 mengalami peningkatan yang sangat baik, dimana aset bertumbuh rata-rata sebesar 8% setiap tahunnya dan laba bersih meningkat rata-rata per tahun sebesar 30%.

Pada periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020, PT. Jamkrinda NTT telah diaudit oleh auditor eksternal baik dari Otoritas Jasa Keuangan maupun auditor eksternal independen yaitu “Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni dan Rekan” dengan opini selama 3 tahun berturut-turut yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

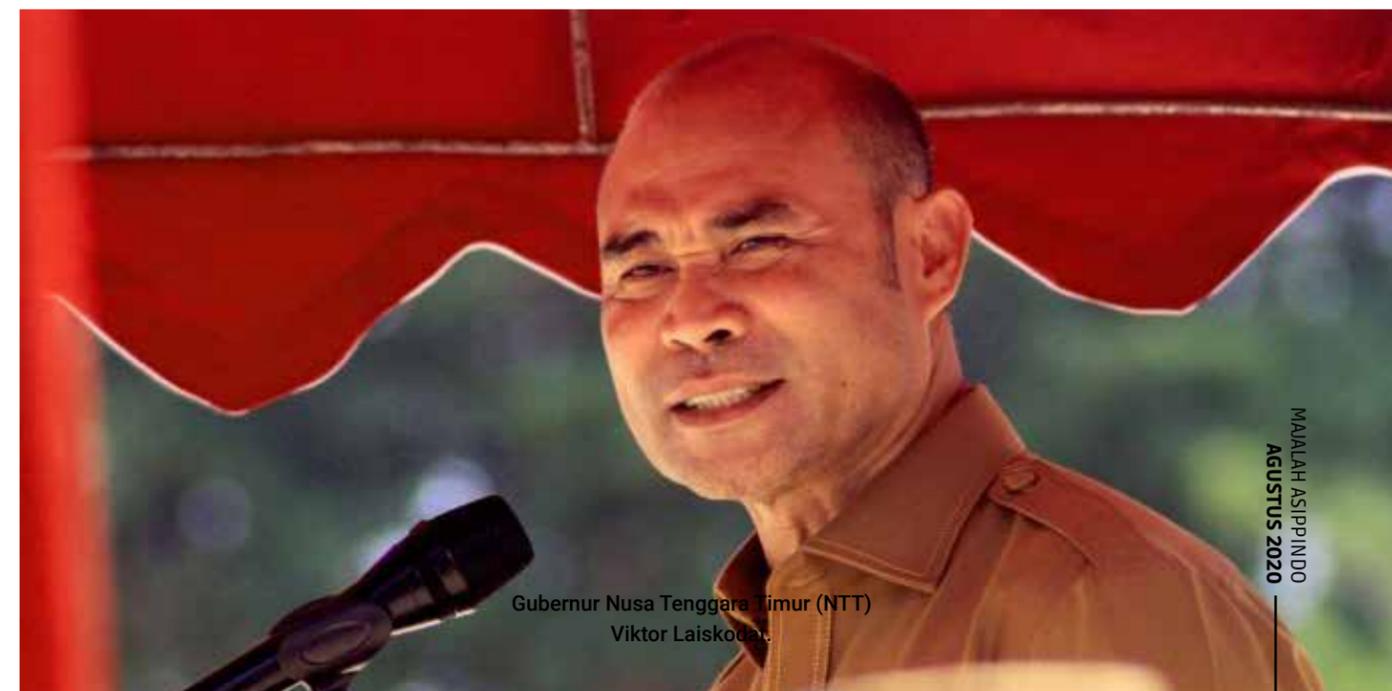
Nilai penjaminan sampai dengan posisi bulan Juni 2020 adalah sebesar Rp.2.627.410.880.243,- dengan total terjamin sebanyak 41.315 orang; sebanyak 27,51% adalah penjaminan untuk usaha sektor UMKMK dan Koperasi produktif yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jamkrinda NTT selalu memberikan kontribusi bagi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui deviden dari tahun 2016 hingga tahun buku 2019, tercatat telah disetor ke kas daerah sebesar 6,710 miliar.

Direktur Utama Jamkrinda NTT ini juga mengimbau semua pihak terkait yang berurusan dengan kredit untuk usaha kecil menengah atas, perlu memahami bahwa situasi Covid-19 tidak boleh menyurutkan semangat bersinis dan membangun usaha di daerah ini.

Karena menurutnya, pemimpin tertinggi di daerah ini saja, dengan sangat terang benderang memberi teladan untuk terus bekerja keras dan cerdas.

“Gubernur NTT telah memberi contoh yang sangat jelas bagi seluruh lapisan masyarakat dengan cara Beliau sendiri melakukan serial kunjungan ke daerah-daerah dan memberi semangat dan motivasi agar rakyat segera bangkit dan keluar dari keterlenaannya. Jangan covid-19 ini menjadi alasan untuk tidak bekerja keras dan berusaha,” ujar Ibrahim Imang. (Sumber: VoxNtt.com)

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT)
Viktor Laiskodat



Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamil menerima kunjungan PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Sulsel.

JAMKRIDA SULSEL MUDAHKAN UMKM DAPATKAN KREDIT

Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamil menerima kunjungan PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Sulsel, di Ruang Rapat Wali Kota Makassar, Selasa (18/8/2020).

Direktur Utama Jamkrida Sulsel, Mulyan Pulubuhu mengatakan, Jamkrida Sulsel memiliki fungsi utama yakni membantu masyarakat dalam memperoleh kredit usaha di Bank. Selain itu, Jamkrida Sulsel merupakan lembaga yang menerbitkan surety bond untuk keperluan perusahaan yang ingin mengerjakan proyek. Penerbitan Surety bond ini mencakup, penawaran, pelaksanaan, pemeliharaan, dan penarikan uang muka.

“Jadi kita tidak memberikan kredit. Tetapi apabila Bank membutuhkan jaminan tambahan kepada calon yang bakal diberikan kredit Bank, maka kami menerbitkan sertifikat penjaminan. Sehingga nantinya jika kreditnya macet, kami yang bakal bayar kreditnya,” kata Mulyan Pulubuhu.

Sementara Prof Rudy mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada Jamkrida Sulsel. Menurutnya, Jamkrida sebagai perusahaan BUMD milik Pemprov Sulsel ini bisa menjadi

Petugas ACT membagikan beras kepada masyarakat.

lembaga yang bisa meningkatkan PAD pemerintahan provinsi.

“Jamkrida ini milik Pemprov Sulsel yang diawasi oleh OJK. Untuk itu, kita patut bersinergi dan memberikan dukungan agar masyarakat terbantu dengan hadirnya Jamkrida Sulsel ini,” pungkasnya. (Sumber: sulawesi.com)

JAMKRIDA BANTEN DAPAT DUA PENGHARGAAN

PT Jamkrida Banten mendapatkan dua penghargaan sekaligus yakni BUMD Terbaik dan CEO Terbaik dalam ajang Top BUMD Award 2020 yang berlangsung Golden Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta, Kamis (27/8). Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur Utama PT Jamkrida Banten Hendra Indra Rachman dan turut dihadiri beberapa pegawai.

Direktur Utama PT Jamkrida Banten Hendra Indra Rachman merasa senang PT Jamkrida Banten bisa kembali terpilih sebagai BUMD Terbaik dalam 2020 untuk ketiga kalinya. Sementara untuk CEO Terbaik 2020 baru yang pertama kali.

“Sangat bersyukur dengan adanya dua penghargaan ini. Dengan begini, eksistensi dan prestasi Jamkrida Banten diakui oleh banyak pihak terlebih lagi ini level nasional,” katanya.

Menurutnya, penghargaan ini juga menjadi cambuk bahwa Jamkrida Banten tidak boleh berhenti di titik ini dan berpuas diri. Seluruh insan Jamkrida harus bisa semakin membuktikan diri eksistensinya. “Jawabannya adalah dengan bekerja semakin keras,” tuturnya.

Ia menambahkan, salah satu unsur penting penilaian adalah inovasi. Dimana, perusahaan harus bisa menjelaskan terobosan bisnisnya yang membuat perusahaan berkembang ke arah yang lebih baik.

“Inovasi kita baik itu dari produk penjaminan, pola pelayanan, dan lainnya dinilai baik tetapi tetap harus ditingkatkan,” katanya.

Ia juga merasa senang karena dinobatkan sebagai Top CEO BUMD 2020. Penghargaan ini sebagai motivasinya agar bisa semakin mengembangkan pola leadership yang sudah diterapkan yakni *Simplicity, Bottom Up*, dan *Close The Gap*.

Ia berharap, penghargaan ini harus menjadi dorongan buat Jamkrida Banten untuk bekerja lebih serius dalam mengembangkan perusahaan. (Sumber: bisnisbanten.com)



Direktur Utama Jamkrida Banten, Hendra Indra Rachman menerima penghargaan.



Direktur Utama Jamkrida Sumsel Lili Kartika (dua dari kanan) menerima penghargaan.

JAMKRIDA SUMSEL MERAIH 3 KATEGORI PENGHARGAAN

Pada acara puncak penganugerahan TOP BUMD Awards 2020 (Kamis/27 Agustus 2020) bertempat di Hotel The Sultan Jakarta, Gubernur Sumsel H. Herman Deru kembali menerima penghargaan TOP BUMD Awards 2020 untuk kategori TOP Pembina BUMD.

TOP BUMD Awards merupakan kegiatan penghargaan tahunan berupa penilaian terhadap kinerja dan performa BUMD dengan tujuan untuk mendorong daya saing BUMD sekaligus mendorong pemulihan ekonomi yang sempat terpuruk selama pandemi Covid-19.

Penghargaan TOP Pembina BUMD diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya. Usai menerima penghargaan, Wakil Gubernur H. Mawardi Yahya

mengatakan TOP BUMD Awards 2020 merupakan apresiasi bagi Pemprov Sumsel di bawah kepemimpinan Herman Deru - Mawardi Yahya (HDMY) dalam membenahi manajemen BUMD selama 2 tahun terakhir.

Menurutnya perhatian dan kerja keras HDMY dalam membina dan memajukan BUMD Sumsel mendapatkan penilaian positif terbukti dengan diraihnya penghargaan TOP Pembina BUMD pada ajang BUMD Awards 2020. "Kedepan

“

TOP BUMD Awards memberikan penghargaan kepada BUMD terbaik atas prestasi dan perbaikan yang telah dilakukan terkait dengan kinerja bisnis, layanan dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Penilaian Top BUMD melibatkan 2.000-an BUMD di seluruh Indonesia dan diseleksi secara objektif dan independen oleh tim penilai dari berbagai instansi.

kita akan terus membenahi manajemen BUMD di Sumsel sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik agar BUMD dapat terus maju dan berkembang.

TOP BUMD Awards memberikan penghargaan kepada BUMD terbaik atas prestasi dan perbaikan yang telah dilakukan terkait dengan kinerja bisnis, layanan dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Penilaian Top BUMD melibatkan 2.000-an BUMD di seluruh Indonesia dan diseleksi secara objektif dan independen oleh tim penilai dari berbagai instansi.

Sementara itu, Afrian Joni selaku Komisaris Utama PT Jamkrida Sumsel menambahkan, selain mendapatkan penghargaan TOP Pembina BUMD untuk Gubernur H. Herman Deru, pada ajang TOP BUMD Awards 2020, PT Jamkrida Sumsel sebagai satu-satunya perusahaan penjamin kredit milik Pemprov Sumsel juga mendapatkan 2 kategori penghargaan sebagai TOP BUMD dengan kinerja sangat baik (Bintang 4) dan TOP CEO BUMD untuk Lili Kartika (Direktur PT Jamkrida Sumsel).

Menurutnya, penganugerahan TOP BUMD Awards 2020 untuk PT Jamkrida Sumsel merupakan bentuk apresiasi atas pencapaian di tahun 2019. PT Jamkrida Sumsel berdasarkan hasil audit KAP telah berhasil meningkatkan perolehan laba tahun buku 2019 menjadi Rp 4,7 miliar dan merupakan perolehan laba tertinggi sepanjang pendirian perusahaan.

Perolehan laba tersebut diperoleh melalui peningkatan kinerja penjaminan seiring dengan pengembangan jaringan pemasaran dan pengembangan produk penjaminan yang mampu menjawab kebutuhan UMKMK di Sumatera Selatan.

Afrian Joni menambahkan, untuk 2020 PT Jamkrida Sumsel telah berhasil melakukan perubahan modal dasar dari Rp 100 miliar menjadi Rp 400 miliar yang diikuti dengan penambahan modal disetor sebesar Rp 40 miliar, serta berhasil melakukan inbreg aset berupa tanah dan bangunan kantor di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 56 Palembang dengan nilai penyertaan sebesar Rp 32,3 miliar melalui perubahan Peraturan Daerah pendirian PT Jamkrida Sumsel.

Dengan perubahan Perda Pendirian tersebut, PT Jamkrida Sumsel diharapkan dapat meningkatkan akselerasi agar dapat menjadi perusahaan penjaminan daerah yang inklusif serta adaptif terhadap perubahan. (Sumber: jamkridasumsel.com)



Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya.

BAHAS PENYERTAAN MODAL UNTUK JAMKRIDA BABEL

Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah memimpin rapat pembahasan penyertaan modal daerah dari APBD sehubungan dengan kondisi keuangan daerah sebagai dampak pandemi Covid-19. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (13/8/2020).

“

Rapat hari ini dalam rangka Pemprov Babel ingin tahu secara persis kondisi lembaga keuangan, yang mana Pemprov Babel diikutsertakan penyertaan modal di dalamnya. Gambaran dari tim analisis investasi telah menjelaskan kondisi perbankan yang dimaksud.



Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah memimpin rapat pembahasan penyertaan modal daerah dari APBD untuk BUMD.



Ilustrasi penyertaan modal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa, saat ini hampir semua sektor perekonomian mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi Covid-19, termasuk perbankan yang ada di Babel.

Fatah mengatakan, perbankan yang dikaji dalam hal ini untuk mendapatkan penyertaan modal daerah terdiri dari Bank Sumsel Babel, Bank Perkreditan Rakyat Syariah Babel, Jamkrida Babel, dan BUMD PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera.

“Rapat hari ini dalam rangka Pemprov Babel ingin tahu secara persis kondisi lembaga keuangan, yang mana Pem-

prov Babel diikutsertakan penyertaan modal di dalamnya. Gambaran dari tim analisis investasi telah menjelaskan kondisi perbankan yang dimaksud,” ungkapnya.

Berdasarkan kajian tim analisis investasi, kondisi Bank Sumsel Babel untuk saat ini masih layak untuk disertakan pinjaman modal dari Pemprov Babel, sehingga harus dilakukan tindak lanjut.

Untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), kondisinya dinilai belum mampu memenuhi syarat yang ditentukan OJK karena belum mampu penyertaan modal awal seratus persen dari modal minimal yang di perlukan, sehingga perbankan ini masuk dalam pengawasan intensif Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Untuk mengurangi kekurangan tersebut, Pemprov Babel akan melakukan kembali dengan masing-masing kepala daerah di setiap kabupaten kota yang ada di Babel. Apakah permasalahan ini dapat dibantu oleh pemprov, mengingat bank yang dimaksud tersebar di setiap kabupaten kota,” ujarnya.

Sementara untuk Jamkrida Babel saat ini masih dalam observasi kajian oleh tim analisis investasi. Sedangkan BUMD PT Bangka Belitung Sejahtera masih dalam hal yang sama. Fatah lebih jauh menjelaskan bahwa sesungguhnya kondisi perekonomian di Babel juga mengalami penurunan akibat dampak Covid-19, sehingga permasalahan ini menjadi perhatian yang serius.

Dalam rapat ini yang hadir Wagub Abdul Fatah, Kepala Biro Hukum Maskupal, Biro Ekonomi, Bappeda, Bakuda, Inspektorat, dan tim analisis investasi. (Sumber: wowbabel.com)

“

Untuk mengurangi kekurangan tersebut, Pemprov Babel akan melakukan kembali dengan masing-masing kepala daerah di setiap kabupaten kota yang ada di Babel. Apakah permasalahan ini dapat dibantu oleh pemprov, mengingat bank yang dimaksud tersebar di setiap kabupaten kota.

PEMROV NTB TARGETKAN DIVIDEN BUMD RP60 MILIAR

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengatakan tidak ada penyertaan modal Pemprov NTB kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan swasta dalam APBD Perubahan 2020. Tidak adanya penyertaan modal Pemprov NTB lantaran kondisi keuangan daerah yang diprioritaskan untuk penanganan covid-19.

Namun, pada 2020, Pemprov NTB menargetkan perolehan dividen dari seluruh BUMD sebesar Rp60,79 miliar lebih.

“Untuk tahun anggaran 2019 besar deviden yang diperoleh dari BUMD adalah Rp54,17 miliar lebih dan tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp60,79 miliar lebih,” kata Wagub dalam rapat paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan dan Raperda tentang perubahan APBD Provinsi NTB Tahun anggaran 2020, Kamis, 27 Agustus 2020 siang kemarin.

Wagub menjelaskan dividen yang diterima Pemprov NTB yang bersumber dari pembagian laba BUMD, dari tahun ke tahun, selalu mengalami fluktuasi. Sesuai dengan kondisi perusahaan dan situasi perekonomian. Selama tiga tahun terakhir, dividen yang diperoleh dari BUMD, rata-rata bisa mencapai 80 persen dari target. Dengan capaian rata-rata per tahun sebesar 58,42 miliar lebih.

Sementara, proyeksi penerimaan dividen dari BUMD tahun anggaran 2021 mendatang, kata Wagub, sedikit menurun menjadi Rp38,36 miliar leb-

ih. “Hal ini terutama disebabkan adanya dampak dari pandemi Covid-19,” jelasnya.

Rohmi mengatakan, Pemprov selaku pemegang saham pengendali, melalui Biro Perekonomian dan Bappenda NTB, selalu mengadakan evaluasi terhadap kinerja BUMD yang ada. Penerimaan dividen dari BUMD, tetap dievaluasi secara periodik. Agar BUMD lebih berperan dalam menggerakkan perekonomian dan pe-



Ilustrasi dividen.



Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

ingkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia membeberkan besar penyertaan modal Pemprov NTB pada BUMD dan perusahaan swasta sampai 2019 lalu. Penyertaan modal Pemprov NTB pada PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp334,21 miliar lebih atau 43,35 persen dari total penyertaan modal.

Kemudian, penyertaan modal di PT. Jamkrida NTB Bersaing sebesar Rp27 miliar atau 83,08 persen dari total penyertaan modal. Selanjutnya, penyertaan modal di PD. BPR NTB sebesar Rp78,66 miliar lebih atau 52,81 persen dari total penyertaan modal.

Selain itu, penyertaan modal ke PT. Gerbang NTB Emas (GNE) sebesar Rp19,97 miliar lebih atau 99,85 persen dari total penyertaan modal. Dan penyertaan modal pada perusahaan swasta sebesar Rp400 juta. Masing-masing sebesar Rp200 juta untuk PT. Askrida dan PT. Suara Nusa Media Pratama.

Wagub menjelaskan, penyertaan modal pada PT. GNE dan PD. BPR NTB, sudah terpenuhi sesuai pagu. Karena itu telah dilakukan perubahan Perda, untuk PT. GNE dan PD. BPR NTB. Sedangkan pada PT. Jamkrida NTB Bersaing dan PT. Bank NTB Syariah belum terpenuhi pagu. (Sumber: suarantb.com)

“

penyertaan modal di PT. Jamkrida NTB Bersaing sebesar Rp27 miliar atau 83,08 persen dari total penyertaan modal. Selanjutnya, penyertaan modal di PD. BPR NTB sebesar Rp78,66 miliar lebih atau 52,81 persen dari total penyertaan modal.

VIRUS BERMUTASI, RISET VAKSIN TETAP BERLANJUT

Pengembangan calon vaksin Covid-19 terus berjalan meski sejumlah riset menemukan adanya mutasi virus SARS-CoV-2 pemicu penyakit tersebut. Alasannya, belum ada bukti virus itu penyebarannya lebih cepat dan ganas.



Ilustrasi riset vaksin virus corona.

Sejumlah riset menemukan mutasi virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Mutasi ini juga ditemukan pada virus yang menular di beberapa wilayah di Indonesia. Namun, kondisi ini tak mengganggu riset vaksin.

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang PS Brodjonegoro menuturkan, dari pengurutan menyeluruh gen virus dari virus SARS-CoV-2 di Indonesia, ada 24 galur (strain) virus ditemukan. Sebanyak sembilan galur di antaranya merupakan mutasi virus dalam kelompok D614G.

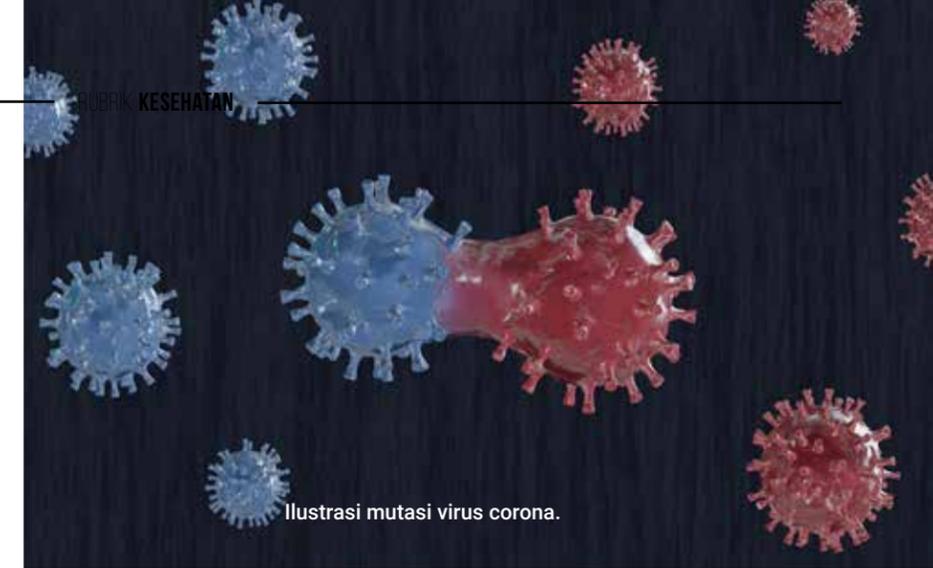
“Dari sembilan mutasi virus D614G, ditemukan dua (galur) di Surabaya, tiga dari Yogyakarta, dua dari Tangerang dan Jakarta, serta dua dari Bandung. Belum ada bukti mutasi virus ini penyebarannya lebih cepat ataupun lebih ganas dan berbahaya,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (2/8/2020).

Mutasi virus ini dinilai tak memengaruhi perjalanan klinis dan terapi serta tak mengganggu riset calon vaksin. Sebab, mutasi tak mengubah struktur dan fungsi *receptor binding domain virus* sebagai target pemberian vaksin.

Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio memaparkan, mutasi virus SARS-CoV-2 dalam kelompok D614G diperkirakan terjadi April 2020.

Mutasi virus D614G dilaporkan pertama kali di Jerman dan China pada Januari 2020. Menurut pendataan pengurutan menyeluruh gen virus SARS-CoV-2 di dunia, 78 persen virus termasuk kelompok D614G.

“Meski belum ada bukti ilmiah



Ilustrasi mutasi virus corona.

bahwa mutasi virus ini memicu penularan lebih luas dan beratnya penyakit, warga jangan mengabaikan pandemi ini. Kewaspadaan harus ditingkatkan lewat protokol kesehatan,” kata Amin.

Guru Besar Ilmu Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Pratiwi Pujilestari Sudarmono mengungkapkan, mutasi virus penyebab Covid-19 tak memengaruhi deteksi virus melalui tes *PCR (Polymerase chain reaction)*. “Meski bermutasi, virus dalam kelompok SARS-CoV-2 sehingga bisa terdeteksi lewat tes PCR. Hasil tes akurat,” ucapnya.

Menurut Direktur Operasional GSI (Genomik Solidaritas Indonesia) Lab, Budiman Kharma, peningkatan tes PCR jadi kunci mempercepat penanganan Covid-19. Semakin masif pemeriksaan, penanganan kasus makin cepat sehingga penyebaran virus bisa ditekan.

Sementara itu, Panel *National Institutes of Health* Amerika Serikat menyebut, belum ada bukti kuat plasma penyembuhan bisa mengobati pasien Covid-19. Karena itu, dokter tak diizinkan memperlakukannya sebagai standar perawatan sampai riset lebih lanjut selesai.

Meski belum ada bukti ilmiah bahwa mutasi virus ini memicu penularan lebih luas dan beratnya penyakit, warga jangan mengabaikan pandemi ini.

“Tak ada cukup data untuk merekomendasikan plasma dari pasien sembuh untuk terapi Covid-19,” sebut panel yang terdiri lebih dari tiga lusin ahli di laman *National Institutes of Health*, Rabu (2/8/2020).

Di Indonesia, plasma penyembuhan diberikan kepada pasien Covid-19 di rumah sakit. “Uji klinik fase satu telah dilakukan, dan uji klinik fase dua serta tiga disiapkan,” kata Wakil Kepala Lembaga Eijkman, David Mulyono.

Terhitung pada 2 September 2020, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan total ada 180.646 kasus Covid-19 di Tanah Air.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut tenaga kesehatan prioritas dilindungi. “Kami ingin menekan angka penularan di kalangan tenaga kesehatan dari 10,02 persen jadi 5 persen,” tuturnya.

Beberapa hal perlu dibenahi antara lain pengaturan jadwal klinik, mengurangi paparan pada tenaga medis, pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, penyediaan alat pelindung diri yang memadai, vitamin, dan insentif. (Sumber: kompas.id)

RUANG PERAWATAN HAMPIR PENUH

Ruang perawatan pasien Covid-19 di sejumlah daerah sudah hampir penuh. Pemerintah daerah diminta menambah kapasitas dan memanfaatkan rujukan daring.

Lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah menyebabkan peningkatan keterisian tempat tidur di rumah sakit yang menangani Covid-19. Sebagian rumah sakit bahkan sudah tak mampu menampung pasien baru, terutama pasien yang membutuhkan penanganan intensif.

Hingga awal September, tingkat keterisian tempat tidur di 67 rumah sakit rujukan Covid-19 di DKI Jakarta mencapai 77 persen. Dinas Kesehatan DKI Jakarta pun berupaya menjaga tingkat keterisian tempat tidur dengan memperbesar kapasitas dan menambah rumah sakit rujukan.

"Di RSUD Cengkareng ada

bangunan baru dengan beberapa ruang yang belum dipakai. Kita tingkatkan sarannya supaya bisa dimanfaatkan untuk tambahan (ruang perawatan pasien) Covid-19," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, Selasa (1/9/2020).

Penambahan tempat tidur dilakukan pada RS yang selama ini menangani Covid-19 dan dengan menambah RS rujukan.

Di Bekasi, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Irfan Maulana mengatakan, dua tempat isolasi berkapasitas 130 tempat tidur sudah penuh terisi pasien positif Covid-19 bergejala ringan. Tempat isolasi itu di Balai Pelayanan Kesehatan dan Wisma Mahasiswa President University di Cikarang.

Senada, Direktur RSU Tangerang Selatan Umi Kulsum mengatakan, ketersediaan ruang isolasi pasien Covid-19 berkapasitas 18 tempat tidur di RSU Tangsel sudah hampir penuh.



Ruang perawatan pasien Covid-19.

RSU Tangsel hanya memiliki ruang isolasi dan tidak memiliki ruang gawat darurat (ICU) Covid-19 yang dilengkapi ventilator.

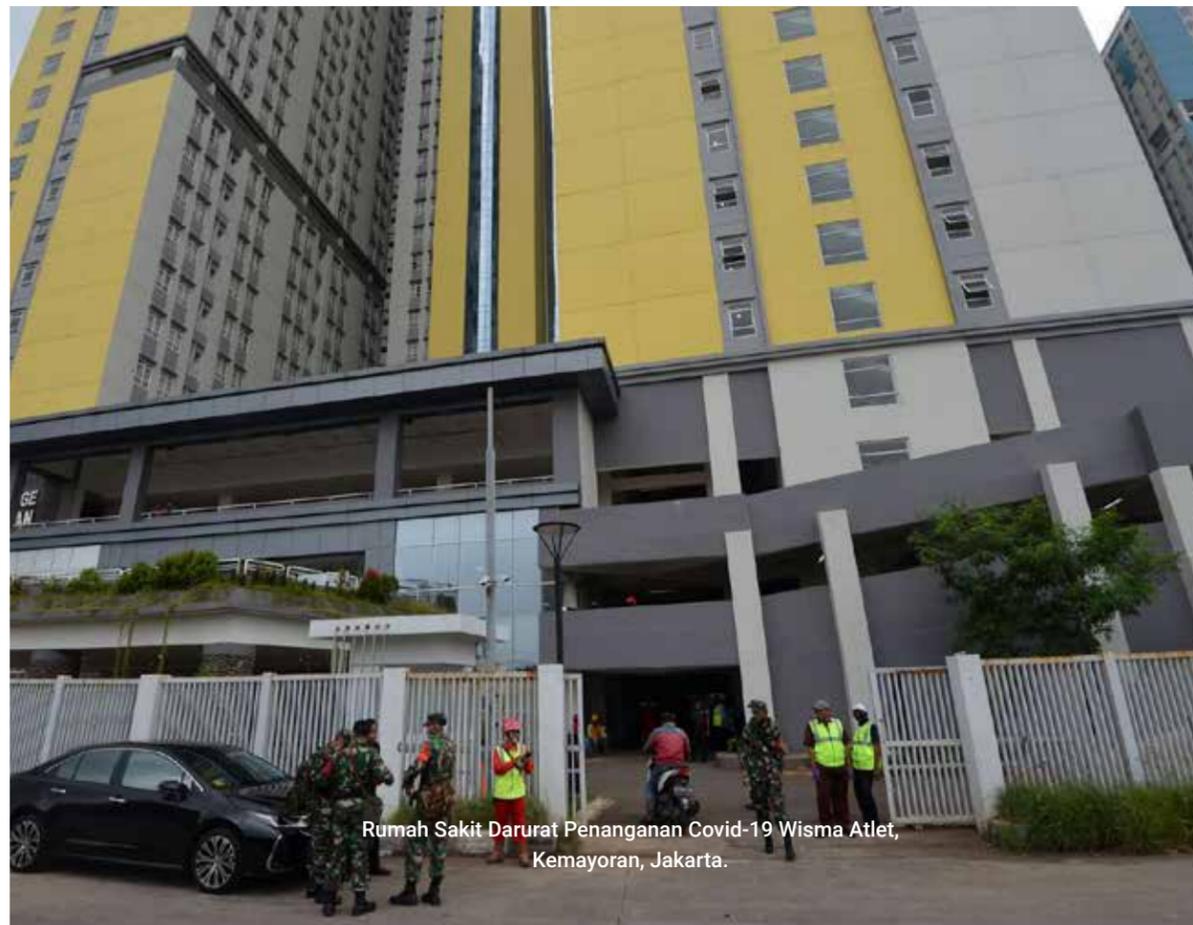
Jumlah keterisian di rumah sakit di Kota Semarang, Jawa Tengah, hingga Selasa siang adalah 680 dari total kapasitas 856 atau 79,4 persen. Kendati demikian, RS-RS di Kota Semarang diyakini masih bisa menampung pasien terkait dengan Covid-19. Itu karena sebagian yang dirawat sedang menunggu hasil pemeriksaan tes usap.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir pun meminta pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan untuk pelayanan Covid-19. Selain

itu, daerah agar juga memanfaatkan sistem rujukan daring agar pasien bisa ditangani cepat dan tepat.

"Aplikasi Sisrute (Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi) bisa dimanfaatkan untuk melihat tingkat keterisian tempat tidur di setiap rumah sakit," katanya, Selasa. Jika ada rumah sakit yang tempat tidurnya penuh, pasien bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang masih bisa menampung.

Kadir menambahkan, secara nasional, tingkat penggunaan tempat tidur untuk penanganan Covid-19 sekitar 47,8 persen. Jumlah rumah sakit rujukan khusus Covid-19 yang telah ditetapkan sebanyak 868 rumah sakit di seluruh Indonesia. (Sumber: kompas.id)



Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta.



Ruang ICU pasien Covid-19.

MENYIAPKAN KOTA

TAHAN KRISIS PASCAPANDEMI

Rutinitas selama pandemi Covid-19 banyak mengubah pola hidup warga kota. Situasi ini mengajarkan semua pihak agar menyiapkan kota yang lebih tahan menghadapi krisis.

 Hampir genap lima bulan pandemi Covid-19, Prima Zahara (28) terus menjalani rutinitas sehari-hari dengan menggunakan masker. Setiap hari melalui rute kereta Depok-Jakarta, dia berusaha mengikuti antrean jaga jarak fisik yang diterapkan dalam protokol kesehatan.

Perempuan asal Depok, Jawa Barat, itu kini terbiasa duduk berjarak untuk menghindari kerumunan. Prima mewanti-wanti saat batuk atau bersin di dalam kereta, terutama karena tahu potensi penularan itu sebagian besar keluar dari mulut.

“
Dari awal-awal pandemi di Jakarta, aku sudah benar-benar jarang keluar rumah. Sebelumnya aku masih ada kegiatan sosial di permukiman padat bareng anak-anak kurang mampu.”



Jakarta di sore hari.



Penumpang kereta memakai masker.

Cara-cara itu dilakukan atas kesadaran diri Prima bahwa dirinya yang tampak sehat bisa saja turut menularkan virus. Dia memandang, masker bukan hanya untuk melindungi diri, melainkan juga mencegah diri sendiri dalam proses menularkan.

Selama pandemi, Prima paling sering menerapkan aturan jaga jarak di keramaian, terutama karena kerumunan di angkutan umum, baik saat, sebelum, maupun sesudah pandemi, membawa kerugian akibat ruang yang makin sempit untuk bergerak. “Dulu desak-desakan di kereta cuma rugi karena enggak dapat tempat. Sekarang ruginya double karena risiko tertular Covid-19,” ujarnya di Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Selain Prima, Azka Putri (27) juga menyadari masalah serupa. Pekerja di perusahaan telekomunikasi ini masih menjalani kebijakan bekerja dari rumah sejak April silam. Perempuan ini menggelisahkan berbagai praktik protokol kesehatan yang belum merata di berbagai tempat.

“Dari awal-awal pandemi di Jakarta, aku sudah benar-benar jarang keluar rumah. Sebelumnya aku masih ada kegiatan sosial di permukiman padat bareng anak-anak kurang mampu. Tetapi, sekarang kegiatan itu pun makin jarang karena pembatasan sosial,” jelasnya.

Cerita Prima dan Azka mungkin mewakili kewaspadaan kaum urban terkait pembatasan sosial selama pandemi

Covid-19. Di sebagian wilayah Jakarta, tampak sulit untuk membatasi kerumunan serta pergerakan orang. Namun, sebagian orang kini terus berupaya membiasakan pola hidup baru tersebut.

Seiring dengan transisi pola hidup warga, sejumlah kalangan peneliti juga memandang masa pandemi sebagai pembelajaran penting untuk tata kota. Direktur Pengembangan Lanskap Urban dari World Resources Institute (WRI) Center for Sustainable Cities, Rogier van den Berg, menilai pandemi akan banyak memengaruhi lanskap pembangunan kota di banyak negara ke depan.

Van den Berg memandang, banyak negara selama ini mengabaikan masalah esensial tentang kelayakan tempat tinggal untuk warga. Ia menyoroti masalah permukiman padat di sejumlah negara yang cenderung tak sehat untuk ditempati.

Michael Kimmelman, kritikus arsitektur dan lanskap perkotaan untuk The New York Times, menuliskan situasi pandemi sebagai fenomena yang anti-urban. Dalam artian, pandemi yang terjadi saat ini tidak memungkinkan kegiatan interaksi antar-orang terjadi karena adanya risiko penularan.

Kimmelman mengatakan, situasi pandemi seakan menjadi kritik untuk kota. “Apakah selama ini kita terlalu berkerumun dalam kelompok urban sehingga semua orang harus lebih berjarak?” ujarnya.



Pemukiman padat di bantaran sungai.

Selama pandemi, Van den Berg menyoroti permasalahan mendasar kota yang kerap luput diperhatikan. Hal tersebut meliputi pengelolaan permukiman, kesehatan masyarakat, serta tata air.

Dalam laporan bertajuk *Towards a More Equal City* disebutkan bahwa sistem tata air serta permukiman yang layak menjadi permasalahan menahun sejumlah kota di Asia dan Afrika. Laporan memprediksi sekitar 1,2 miliar penduduk kota di dunia akan semakin kesulitan mendapat permukiman yang layak.

Dengan masalah kepadatan seperti itu, Van den Berg menyebutkan, penanganan krisis seperti pandemi Covid-19 akan makin sulit dilakukan ke depan. "Covid-19 mungkin alarm bagi kita untuk memperbaiki masalah tersebut sebelum situasi menjadi lebih parah," ungkapnya.

Selain sejumlah penataan tersebut, kota perlu belajar memanfaatkan bermacam data berskala nasional. Hal tersebut sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penanganan krisis.

Associate professor bidang sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir, menilai berbagai elemen penanganan krisis semacam itu belum dimiliki Indonesia. Dalam perspektif ketahanan sosial atau sociotechnical resilience, Indonesia masih banyak kekurangan dari segi infrastruktur dan lembaga saat pandemi mulai melanda (Kompas, 30/5/2020).

Di Indonesia hanya tersedia 1,2 tempat tidur di rumah sakit untuk 1.000 orang. Angka tersebut mengacu pada data Bank Dunia tahun 2015. Angka itu terbilang rendah dibandingkan dengan Jepang. Data serupa menyebut Jepang memiliki 13,4 tempat tidur di rumah sakit untuk 1.000 orang. Kondisi ini yang disebut Sulfikar sebagai permasalahan infrastruktur.

Pandemi juga diperparah dengan keabsenan lembaga yang khusus berperan sebagai juru penanganan wabah. Meski ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lembaga ini tidak secara spesifik menangani wabah. Secara kelembagaan pun BNPB tidak didominasi oleh orang-orang yang memahami penanganan wabah secara epistemologis.

Peneliti dan pengajar di Departemen Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara, Suryono Herlambang, mengatakan, pandemi menjadi pemicu akan persoalan esensial wilayah urban yang belum terselesaikan. Selagi kesadaran warga terhadap pola hidup bersih dan sehat sedang tinggi, penting untuk terus membenahi kelayakan permukiman dari aspek kesehatan.

"Pandemi telah menjadi momen pemicu bagi warga untuk hidup lebih bersih dan sehat. Alangkah baik kalau itu juga menjadi momen untuk membenahi lingkungan yang lebih layak. Sebab, saat ini, permukiman padat berisiko menularkan wabah lebih masif," tuturnya. (Sumber: Kompas.id)

Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia

penjaminan Tumbuh

DAN BERKEMBANG

Bersama

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi





Asippindo

Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia



PENJAMINAN

KUR



Pemberian Jaminan kepada UMKM dan Koperasi yang Mendapat Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perusahaan Anggota Asippindo juga Memberikan Jaminan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja, dan/atau Investasi kepada UMKMK di Bidang Usaha yang Produktif dan Layak.